

PERAN DINAS PERIKANAN DALAM PENGELOLAAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN PEMBUDIDAYA TAMBAK DI KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Muhammad Rizqi Rahmani¹, Muhammad Noor², Nur Hasanah³

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi Peran Dinas Perikanan dalam pengelolaan peningkatan produktivitas perikanan bagi pembudidaya di Kelurahan Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan produktivitas perikanan tersebut. Pengelolaan peningkatan produktivitas perikanan pembudidaya di Kelurahan Babulu Laut penting dilakukan, karena daerah ini memiliki potensi produktivitas perikanan yang baik, karena memiliki luas lahan besar serta dinyatakan sebagai kawasan Minapolitan melalui Surat Keputusan Nomor 35/KEPMEN.KP/2013. Dengan potensi tersebut Babulu Laut dapat dikatakan sentra strategis pembangunan perekonomian daerah sektor perikanan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan terhadap variabel yang diteliti. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan Dinas Perikanan dalam pengelolaan peningkatan produktivitas perikanan meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelatihan, pemberian fasilitas dan pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan potensi perikanan. Dinas Perikanan telah berupaya melaksanakan setiap peran tersebut, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan terdapat faktor-faktor penghambat seperti sumber daya manusia, anggaran, dan kesadaran pembudidaya untuk mengembangkan potensi tambak di Babulu Laut.

Kata Kunci: *Perikanan, tambak, produktivitas*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: muhrizqirahman09@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Produksi perikanan di Kalimantan Timur pada tahun 2013 berkisar sebesar 214.651,1 Ton dari dua sektor perikanan. Sektor perikanan laut dan darat. Penajam Paser Utara penyumbang produksi perikanan ke enam dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan timur dengan total produksi sebesar 12.400,4 ton dari dua sektor perikanan laut dan darat. Pencapaian peningkatan produksi perikanan memang tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan manajemen sumber daya akan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Peran pemerintah sebagai salah satu subjek penting dalam mengelola negara menjadi hal yang tidak dapat disepelekan, karena jika pengelolaan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum akan membuahkan hasil yang sangat merugikan bagi negara itu sendiri.

Babulu Laut yang adalah tempat atau lokus peneliti dalam melakukan penelitian yang merupakan wilayah strategis dalam memproduksi perikanan, khususnya budidaya tambak. Melalui Surat Keputusan Nomor: 35/KEPMEN.KP/2013 Babulu Laut merupakan sentral minapolitan yang merupakan konsepsi pembangunan ekonomi yang berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan pembangunan. Luas tambak di Babulu Laut mencapai 5.000 Hektar yang berada dalam garis pantainya lebih dari 200 km.

Produksi budidaya perikanan Penajam Paser Utara mengalami penurunan dari tahun 2015 ke 2016. terjadinya penurunan karena sebagian besar tambak yang ada, khususnya di desa Babulu Laut, sedang diadakan rehabilitasi tambak dan perbaikan saluran-saluran tambak, termasuk sarana pendukung lainnya, selain itu juga dikarenakan Keramba Jaringan Apung (KJA) pengelolaannya belum maksimal.

Belum maksimalnya realisasi produksi perikanan budidaya target yang diharapkan dalam produksi mencapai 9.327,60 ton namun realisasi yang dilaksanakan hanya mencapai 2.445,7 ton (28,10%). Sedangkan produksi perikanan tangkap mendekati target yang ingin dicapai, target yang diharapkan mencapai 5.981,2 ton dan realisasi yang dilaksanakan mencapai 4.687,20 ton (98,28%). Dari data pada tabel 1.4 tersebut, dapat dipahami bahwa peningkatan produksi perikanan di Penajam Paser Utara dimaknai secara umum dari berbagai kecamatan yang ada. Walaupun produksi perikanan mengalami peningkatan disatu sisi, namun di sisi lainnya penurunan produksi juga perlu dipahami dari produktivitas nelayan atau pembudidaya perikanan dipenajam. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Dinas Perikanan dalam Pengelolaan Peningkatan Produktivitas Perikanan Pembudidaya Tambak di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara”.

Kerangka Dasar Teori

Manajemen Sumber Daya Manusia

Edwin B. Flippo menyebutkan manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Dalam makna yang sama Wandel French dalam terjemahan T. Hani Handoko, menyebutkan manajemen sumber daya manusia adalah terdiri dari penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh perusahaan (dalam Akob Kadir 2016:9). Abdul Hakim (2014:5) memberikan pengertian manajemen sumber daya manusia sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dari berbagai pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan dan seni yang perkembangannya berkaitan dengan perkembangan cara produksi baru yang memungkinkan digunakannya pengelolaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan tertentu.

Peran

Soerjono Soekanto (1990:268, dalam Sugeng Pujileksono, 2015), “peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Dalam pengertian yang sama dengan sudut pandang ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. (Koentjoroningrat, 1986:35, dalam Sugeng Pujileksono, 2015).

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran berkenaan dengan kedudukan atau posisi dari suatu jabatan tertentu atau hal yang berkenaan dengan tugas dan fungsinya. Tetapi juga peran tidak dimaknai hanya dalam ranah jabatan tertentu, peran juga bermakna kegiatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam mencapai suatu tujuan.

Pengelolaan

Menurut Zaidan Nawawi manajemen mencakup rumusan yang lebih luas dari kata pengelolaan atau pengurusan dimana keduanya menjadi bagian di dalam arti manajemen (Zaidan Nawawi, 2015:7)

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Dalam makna yang spesifik Adisasmita (2012:22), mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi

manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dari berbagai pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) merupakan cara atau upaya dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi serta mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Serta pengelolaan (manajemen) merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan seni memberdayakan sumber daya yang ada.

Produktivitas

Dalam doktrin Konferensi Oslo tahun 1984 (dalam Hayu Handayani, 2009), tercantum pengertian umum produktivitas semesta, yaitu produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia, dengan menggunakan sumber-sumber riil yang makin sedikit (Sinungan, 1999: 17). Sedangkan menurut pusat produktivitas Nasional Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia (2003:12, dalam Nuraini 2012) mengemukakan bahwa produktivitas yaitu sebagai ukuran dari tingkat efisiensi dan efektifitas dari setiap sumber yang dipergunakan selama produksi berlangsung dengan membandingkan antara jumlah yang dihasilkan dengan semua sumber yang telah dipergunakan atau seluruh sumber yang dipakai.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Produktivitas Kerja

Menurut balai Pengembangan Produktivitas Daerah, terdapat enam faktor utama yang memengaruhi produktivitas tenaga kerja (Sedarmayanti, 2001:144, dalam Nuraini 2012) adalah:

- a. Sikap kerja, seperti: kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (*shift work*), dapat menerima tambahan tugas dan bekerja dalam satu tim.
- b. Tingkat keterampilan, yang ditentukan oleh pendidikan dan pelatihan dalam manajemen dan supervisi serta keterampilan dalam teknik industri.
- c. Hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin dalam usaha bersama antara pemimpin organisasi dan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu (*quality control circles*) dan panitia mengenai kerja unggulan.
- d. Manajemen produktivitas yaitu manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas.
- e. Efisiensi tenaga kerja, seperti perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas.
- f. Kewiraswastaan, yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreativitas dalam usaha, dan berada dalam jalur yang benar dalam usaha.

Perikanan

Menurut UU No. 45 Tahun 2009, semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Hampel dan Pauly mengemukakan bahwa perikanan adalah kegiatan eksploitasi sumber daya hayati laut. Sedangkan menurut Lackey menyebutkan bahwa perikanan adalah suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu, biota perairan, habitat biota dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut, dari komponen-komponen tersebut akan memengaruhi performa perikanan. (www.pengertianpakar.com, diakses 18 Desember 2017)

Dari pengertian diatas, perikanan dimaknai sebagai suatu usaha yang berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hingga pendistribusian sumber daya ikan atau sejenisnya yang dikelola serta diberdayakan oleh manusia dan terdapat diperairan.

Pembudidaya

Menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pembudidaya ikan diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. Kedua, pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam Undang-Undang tentang Perikanan juga disebutkan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan mengembangbiakan ikan serta memanen hasilnya.

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pembudidaya merupakan kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya ikan untuk dipelihara, dibesarkan, serta mengembangbiakan ikan untuk dijual atau dimakan sendiri.

Peran Dinas Perikanan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan dari perubahan nomenklatur pada Kementerian Negara Republik Indonesia terhadap Dinas Perikanan. Didalam perda ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok yaitu:

Merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional dibidang keulautan dan perikanan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan, sedangkan untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang kelautan dan perikanan.
- d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Peran Dinas Perikanan dalam pengelolaan peningkatan produktivitas perikanan pembudidaya tambak:
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan melalui pelatihan dan pembelajaran.
 - b. Memberikan fasilitas dan pembinaan terhadap pembudidaya perikanan.
 - c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan potensi kelautan dan perikanan.
2. Faktor Penghambat pengelolaan peningkatan produktivitas pembudidaya perikanan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hasil Penelitian

Peran Dinas Perikanan dalam Pengelolaan Peningkatan Produktivitas Perikanan Pembudidaya Tambak

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perikanan Melalui Pelatihan

Dalam pelaksanaannya Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah melakukan upaya pelatihan dalam bentuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, hal ini dikerjakan melalui penyuluhan dan pelatihan berupa kunjungan lapangan dan perbandingan. Hal ini sesuai pula dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak garam dalam hal memberdayakan Dinas melakukan strategi pemberdayaan dengan pendidikan dan pelatihan, serta mempermudah akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang berkaitan dengan usaha pembudidaya tambak.

Dinas Perikanan dalam memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan, khususnya pembudidaya Babulu Laut. Dengan diberangkatkan ke Jawa untuk melakukan kunjungan sekaligus pembelajaran bagaimana mengelola tambak yang bisa

memaksimalkan potensi perikanan. Walaupun pelatihan tersebut belum memberikan efek yang maksimal karena perbedaan layout dan pola tambak.

Walaupun terdapat persoalan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan, terdapat capaian dan peningkatan produktivitas yang telah dihasilkan dari kinerja yang dilakukan kepada pembudidaya tambak di Babulu Laut. Peningkatan produksi ini memperlihatkan dalam rentang waktu 2016-2017 komoditas undang windu tahun 2016 dari 15,2 Ton meningkat pada tahun 2017 meningkat menjadi 21,44 ton, komoditas bandeng pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 386 menjadi 243,51 ton pada tahun 2017.

Dari realisasi pencapaian dari ikan bandeng yang menjadi komoditas utama dari kawasan minapolitan pada tahun 2016 adalah sebesar 13,19% dari target produksi sebesar 1.846,83 Ton hanya mampu memenuhi pencapaian sebesar 243,51 Ton. Sedangkan untuk komoditas undang windu dan rumput laut mempunyai jumlah produksi yang cukup besar dan potensial untuk dikembangkan.

Selain data pada itu, terdapat pula data yang menyebutkan berkaitan dengan jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Data yang menyebutkan tentang perbandingan hasil produksi di empat Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara menyebutkan bahwa Babulu merupakan wilayah paling besar menyumbang ikan yaitu sebesar 8.570 Ton, sedangkan wilayah Kecamatan Penajam memperlihatkan hasil produksi perikanan tangkap yang paling besar dari empat kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jumlah produksi sektor perikanan yang ada di wilayah Kabupaten PPU setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif yang menandakan belum stabil, baik perikanan laut maupun perikanan darat.

Peran dinas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bentuk dan metode telah dilaksanakan. Hanya saja belum maksimal dikarenakan oleh berbagai faktor yang perlu ditingkatkan kembali seperti peningkatan pada SDM, anggaran, dan pola pikir yang berorientasi pada keberhasilan atau pencapaian hasil. Selain itu perlu pula ditingkatkan pemahaman akan kondisi lapangan dalam hal ini adalah pengetahuan teoritis dan teknis, agar bisa memaksimalkan program sebagaimana yang diharapkan. Kemudian perlu pertimbangan yang matang dalam hal pelatihan komparasi atau perbandingan dengan pembudidaya tambak di luar wilayah tersebut, ini penting karena untuk efisiensi dan efektifitas anggaran yang sudah direncanakan agar bisa bermanfaat dan menghasilkan *Outcome* yang maksimal.

Sebagaimana yang dikemukakan Cut Zurnali (2004, dalam Wikipedia diakses 21 Januari 2018), menyebutkan bahwa pelatihan adalah agar para pekerja dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan perilaku yang ditekankan dalam dalam program-program pelatihan dan untuk diterapkan dalam aktivitas sehari-hari para pekerja. Adapun pengukuran keberhasilan program pelatihan dari para peserta dikemukakan oleh Soekidjo Notoatmodjo (1991:53, dalam Wikipedia

diakses 21 Januari 2018) ada dua hal, *Pertama* adalah peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas, *Kedua* adalah perubahan perilaku yang tercermin pada sikap, disiplin dan etos kerja.

Memberikan Fasilitas dan Pembinaan terhadap Pembudidaya Perikanan

Dari pengamatan dan wawancara penulis memang terdapat kendala dari Dinas Perikanan, kendala ini berupa tenaga teknis untuk melakukan pembinaan kepada kelompok pembudidaya, dari dinas hanya terdapat 7 tenaga penyuluh yang dibagi untuk 4 wilayah di Kabupaten PPU. Di Babulu Laut sendiri hanya ada 1 penyuluh yang masih aktif melakukan penyuluhan kepada pembudidaya, tetapi belum cukup maksimal karena hanya beberapa pembudidaya saja yang didatangi penyuluh ini hanya melalui perwakilan kelompok.

Pemberian fasilitas dan pembinaan yang dilakukan kepada pembudidaya dapat penulis berkesimpulan sementara sudah terrealisasikan, namun masih belum maksimal karena terkendala SDM dan anggaran yang terbatas. Karena berkaitan dengan pemberian fasilitas memerlukan pembiayaan yang terencana agar tepat sasaran, tetapi dari pengamatan langsung penulis berkaitan dengan pengadaan Excavator PC 200 satu unit tahun 2017 ini memerlukan evaluasi yang baik antara masyarakat maupun pemerintah daerah dan dinas serta kementerian, agar ketika sewaktu merencanakan pengadaan sudah dengan pertimbangan yang matang. Selain itu, penulis juga melihat ada satu unit Excavator PC 100 yang ditaruh di Balai Benih Ikan (BBI) di kelurahan Nenang Penajam, Excavator ini dipergunakan dinas untuk melakukan penggalian lahan penampungan air dan juga perapian lahan disekitar pekarangan BBI. Selain BBI Dinas Perikanan juga sudah membuat pasar ikan di Babulu Laut yang biasanya beroperasi 1 minggu sekali dalam kegiatan jual-beli ikan.

Dalam melakukan pengadaan Excavator pada tahun 2017 juga bekerja sama dengan anggota DPR RI dalam menyalurkan kebutuhan bagi pembudidaya tambak di Babulu Laut, Excavator tersebut merupakan milik masyarakat pembudidaya yang diberikan gratis dari anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemberian sarana dan prasarana tersebut berguna untuk mobilitas yang memadai bagi pembudidaya, selain sarana dan prasarana Dinas Perikanan juga melakukan pembinaan terkait hal teknis dan juga administrasi bagi pembudidaya, yang juga merupakan tugas dinas dalam melakukan sosialisasi peraturan yang berlaku.

Pemberian fasilitas dan pembinaan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara kepada pembudidaya perikanan Babulu Laut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun perlu ditingkatkan kembali, dalam hal peningkatan sumber daya manusia untuk melakukan pembinaan agar dapat memenuhi target yang maksimal.

Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengelolaan Potensi Kelautan dan Perikanan

Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan kepada pembudidaya telah dilaksanakan, hanya saja karena terkendala oleh SDM dan anggaran yang memadai berdampak pada tidak intensif atau secara terus menerus. Ini dikarenakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian ke lokasi tambak pembudidaya Babulu Laut cukup jauh dan memerlukan dana akomodasi untuk operasional para pengawas tersebut.

Selain itu juga permasalahan yang dialami oleh pembudidaya adalah berkenaan dengan penggunaan racun yang sebenarnya biasa secara turun-menurun dia lakukan, pelarangan tersebut dikarenakan akan merusak ekosistem tambak tersebut selain berpengaruh pada konsumen yang memakan ikan hasil tambak. Ada pula berkaitan dengan masalah virus bagi pembudidaya udang windu yang mengalami gagal sebelum panen, penuturan pembudidaya menyebutkan ketika udang sudah berusia 1-2 bulan udang tersebut gampang terserang virus yang mengakibatkan kematian bagi udang, hal ini sepenuhnya perlu ditangani bukan hanya dari dinas tetapi juga oleh seluruh pihak yang berwenang untuk mencari solusi terbaik bagi pembudidaya selain solusi alternatif racun yang ramah lingkungan, dan yang lebih sulit lagi berkaitan hama dengan pencurian ikan dilahan tambak pembudidaya.

Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pembudidaya tambak belum cukup maksimal, ini dikarena hal yang berupa kurangnya tenaga atau sumber daya manusia disamping dana yang minim. Hal tersebut dalam konsep pengawasan dan pengendalian belum maksimal dengan yang dikemukakan oleh Zaidan Nawawi (2015:38) yang mengemukakan bahwa kegiatan manajemen berupa pengawasan merupakan suatu fungsi yang didalamnya termasuk mengendalikan pelaksanaan agar sesuai rencana, mengukur hasil dibandingkan dengan target atau rencana, melakukan tindakan atas terjadinya penyimpangan dan menyusun *feed-back* demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Faktor Penghambat Pengelolaan Peningkatan Produktivitas Pembudidaya Tambak oleh Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan dari wawancara peneliti dengan informan dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengelolaan peningkatan produktivitas bagi pembudidaya, Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki keterbatasan sumber daya manusia baik secara kemampuan akademis dan teknis serta kuantitas tenaga, hal tersebut belum sesuai dengan prinsip manajemen sumber daya manusia yang disampaikan Armstrong (2003) menyebutkan manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan terhadap manajemen manusia yang berdasarkan empat prinsip dasar. Pertama, sumber daya manusia adalah harta paling berharga dan penting yang dimiliki suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi

tersebut. Kedua, keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari perusahaan tersebut saling berhubungan, dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan perencanaan strategis. Ketiga, kultur dan nilai organisasi, suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik. Keempat, adalah manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan integrasi yakni semua anggota organisasi anggota tersebut terlibat dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Terbatasnya Anggaran dan Fasilitas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan diatas maka dapat diketahui bahwa dalam melakukan kunjungan kelokasi pembudidaya di Babulu Laut yang merupakan kawasan minapolitan diperlukannya anggaran yang memadai, berupa dana operasional dalam melakukan kunjungan, karena jarak kantor Dinas Perikanan ke Babulu Laut cukup jauh dan ini membutuhkan biaya untuk bahan bakar kendaraan, walaupun dalam pengamatan penulis sudah terdapat fasilitas dinas yang berupa kendaraan roda empat dan dua sebagai sarana penunjang. Begitupun berkenaan dengan persoalan pakan ikan yang menjadi kendala bagi pembudidaya dalam melakukan budidaya ikan, keperluan industri pakan menjadi hal yang sangat menunjang bagi optimalisasi budidaya perikanan. Selain itu, ini juga berkaitan dengan defisit anggaran untuk pendanaan peninjauan dinas kelapangan.

Kurangnya Pemahaman Pembudidaya Untuk Mengembangkan Potensi Tambak di Babulu Laut

Analisa peneliti bagi dinas perikanan perlu memotivasi dan memfasilitasi pembudidaya yang aktif berkomunikasi dengan dinas untuk dapat membuat lahan percontohan dengan baik agar dapat mendorong kawan-kawan pembudidaya bisa menarik minat untuk mencoba keberhasilan tersebut, dengan cara seperti itu dapat dimungkinkan usaha yang dilakukan berjalan optimal. Sebagaimana yang dikemukakan Gasperz dan Djamali senada dengan pengertian dari ensiklopedia yang menitik beratkan luaran (*output*) dan masukan (*input*) dalam aktivitas produksi. (dalam Hayu Handayani, 2009).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peran Dinas Perikanan dalam Pengelolaan Peningkatan Produktivitas Pembudidaya Tambak di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan amanat Perbup Nomor 57 Tahun 2016 telah dilaksanakan, hanya saja belum maksimal dikarenakan sumber daya manusia, pendanaan dan sarana prasarana untuk menunjang program dan kegiatan.

2. Peran Dinas Perikanan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bentuk dan metode telah dilaksanakan, hanya saja belum maksimal dikarenakan oleh berbagai faktor yang perlu ditingkatkan kembali seperti peningkatan pada SDM, anggaran, dan pola pikir yang berorientasi pada keberhasilan atau pencapaian hasil. Selain itu perlu pula ditingkatkan pemahaman akan kondisi lapangan dalam hal ini adalah pengetahuan teoritis dan teknis, agar bisa memaksimalkan program sebagaimana yang diharapkan.
3. Peran dalam pemberian fasilitas dan pembinaan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara kepada pembudidaya perikanan Babulu Laut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun perlu ditingkatkan kembali, dalam hal peningkatan sumber daya manusia untuk melakukan pembinaan agar dapat memenuhi target yang maksimal.
4. Peran pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan kepada pembudidaya telah dilaksanakan, hanya saja karena terkendala oleh SDM dan anggaran yang memadai berdampak pada tidak intensif atau secara terus menerus, ini dikarenakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian ke lokasi tambak pembudidaya Babulu Laut cukup jauh dan memerlukan dana akomodasi untuk operasional para pengawas tersebut.
5. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan pengelolaan peningkatan produktivitas pembudidaya perikanan diantaranya adalah:
 - a. Terbatasnya sumber daya manusia ini dapat mempengaruhi kinerja Dinas Perikanan dalam kegiatan yang terprogramkan Dalam melakukan kegiatan yang telah terprogram serta mengakomodir semua keluhan atau kendala yang dialami oleh pembudidaya dalam mengembangkan tambaknya. Selain itu juga, kompetensi dari personil tenaga teknis yang belum dibekali ilmu pengetahuan yang terbilang maju menjadi kendala yang dapat berdampak kepada pembudidaya.
 - b. Dalam melakukan kunjungan kelokasi pembudidaya di Babulu Laut yang merupakan kawasan minapolitan diperlukannya anggaran yang memadai, berupa dana operasional dalam melakukan kunjungan, karena jarak kantor Dinas Perikanan ke Babulu Laut cukup jauh dan ini membutuhkan biaya untuk bahan bakar kendaraan. Begitupun keperluan industri pakan menjadi hal yang sangat menunjang bagi optimalisasi budidaya perikanan.
 - c. Kurangnya Pemahaman Pembudidaya Untuk Mengembangkan Potensi Tambak di Babulu Laut, bahwa pandangan yang berkenaan dengan pengembangan potensi tambak sebagaimana program dari pemerintah yang kurang ditanggapi dengan responsif oleh pembudidaya ini berkaitan dengan intensifitas komunikasi antara dinas dan pembudidaya selain metode bagaimana upaya tersebut dipertimbangkan.

Saran

1. Sebaiknya Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara perlu meningkatkan sumber daya manusia, dan sesuai kompetensi serta kemampuan teknis sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing. Serta membentuk Tim Khusus Internal Bidang Perikanan budidaya yang menangani permasalahan yang dialami pembudidaya dengan klasifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan disiplin ilmu dan pengetahuan teknis yang mumpuni.
2. Sebaiknya Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menjalin kerja sama dengan Forum Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk mendukung anggaran dan kegiatan membangun laboratorium perikanan dengan perangkat teknologi canggih dan membangun industri pakan agar dapat mengurangi biaya pembiayaan pembudidaya.
3. Sebaiknya Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara perlu memotivasi dan memfasilitasi pembudidaya tambak yang aktif berkomunikasi dengan dinas agar menjadi pelopor dengan dukungan ilmu pengetahuan serta dana, untuk pelaksanaan percontohan pengembangan budidaya perikanan kepada sesama kawan pembudidaya secara persuasif untuk menerapkan pengembangan tambak sesuai dengan program dan kebutuhan yang semestinya.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo, 2012, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu.
- Hakim, Abdul, 2014, *Dinamika Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Pendekatan Konvensional dan Nilai-Nilai Islami)*, EF Press Digimedia, Semarang.
- Handayani, Hayu, 2009, *Pola Keruangan Produktivitas Budidaya Ikan Air Tawar Lele (Clarias sp) di Kota Depok*, 1-60
- Kadir, Akob, 2016, *SDM dan Daya Saing dalam Bingkai Kearifan Lokal*, Alauddin University Press, Makassar
- Nawawi, Zaidan, 2015, *Manajemen Pemerintahan*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok.
- Pujileksono, Sugeng, 2015, *Pengantar Antropologi (Memahami Sosial Budaya)*, Intrans Publishing, Malang.

Dokumen-Dokumen:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. (PDF)